



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT
Fave Hotel-Jakarta, 29 Oktober 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Penyusunan RKPD Tahun 2017
- Rencana Kerja Pemerintah 2017
- Program Strategis Nasional di Provinsi NTT



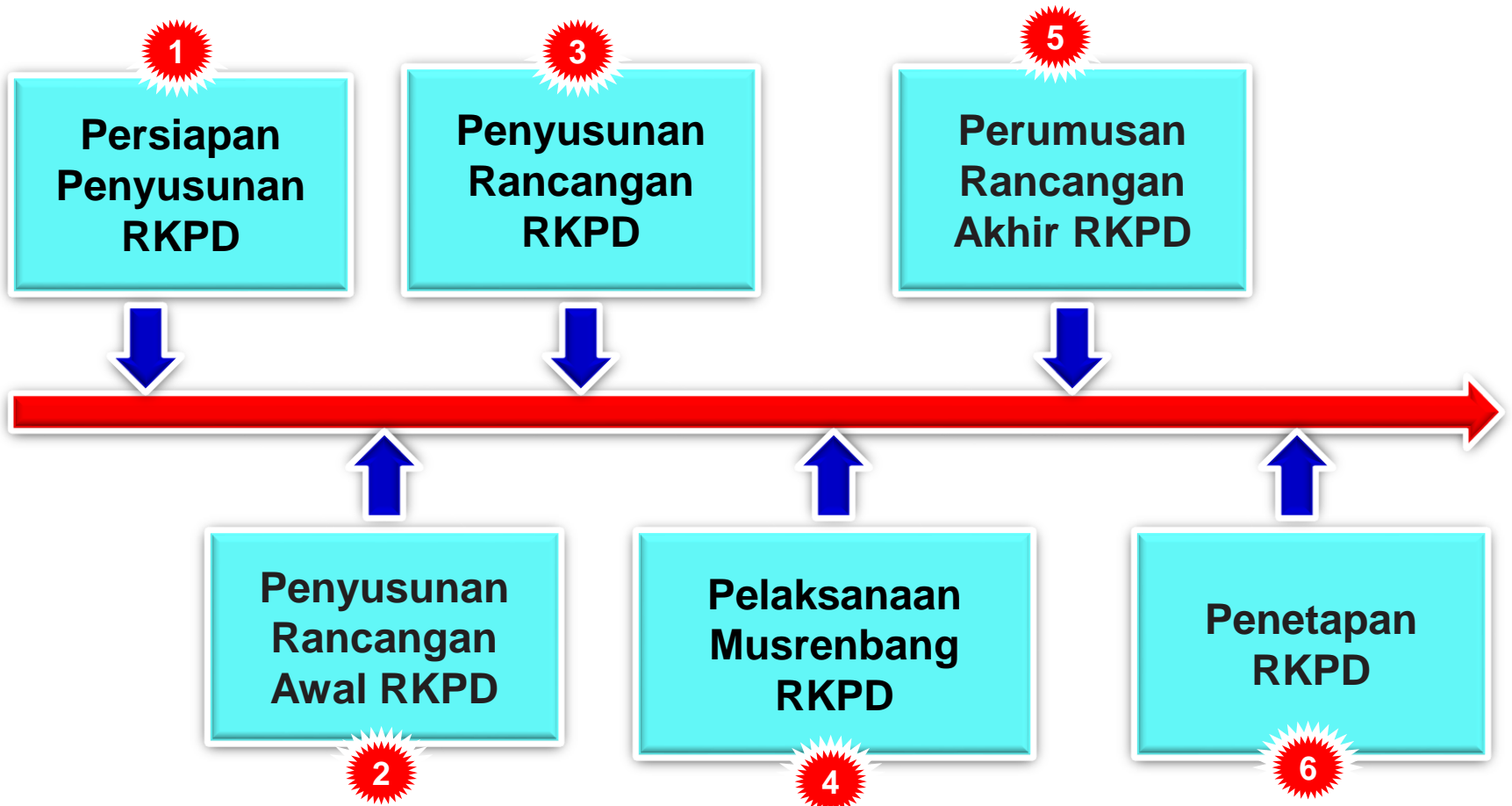


Penyusunan RKPD Tahun 2017

Permendagri 18/2016



Tahapan Penyusunan RKPD



Arahan Penyusunan RKPD

1. Harus selaras dan konsisten dengan:

- Prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
- RKP,
- Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Harus memperhatikan:

- Kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

3. Mengacu pada:

- Pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional,
- Arah kebijakan Pemerintah nasional.

Muatan RKPD

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
 - Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit dua tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
2. Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



RKP 2017



Arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

- **TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.**
- Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
- Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
- Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan: Holistik-Tematik, Terintegrasi, dan Spasial

- **Holistik- Tematik:** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif:** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- **Spasial:** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

**VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**

Visi ini diwujudkan melalui **7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019

INDIKATOR MAKRO	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018*	2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3)**	7,1 (5,5 – 5,9)	7,5	8,0
Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)	11,5 (10,9)	13,2 (10,6)	14,2 (12,2)**	14,6 (12,6-12,8)	15,2	16,0
Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,6 – 5,9)	5,0-5,3 (5,3 – 5,6)	4,6-5,1	4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0-10,0 (10,96)	9,5-10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0 – 10,8)	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0
Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	n.a (0,41)	0,40 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	meningkat

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali

***) Target APBN 2016

****) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

Sumber: RPJMN 2015-2019

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

1. Dimensi Pembangunan Manusia:

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan:

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

4. Kondisi Perlu:

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017





Program Strategis Nasional di Provinsi NTT



PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Kupang*		

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pengembangan Bandara Komodo 2. Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang		

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo 2. Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca 3. Pengembangan Dermaga pariwisata di Ende 4. Pembangunan Dermaga pariwisata di Maumere 5. Pengembangan Faspel Laut Marapokot 6. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata 7. Pembangunan Pelabuhan TenauKupang* 8. Pengembangan Pelabuhan Maritaing 9. Pengembangan Pelabuhan Baing 10. Pengembangan Pelabuhan P.Salura		

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
11. Pengembangan Pelabuhan Kendidi/Reo 12. Pengembangan Pelabuhan Pota 13. Pengembangan Pelabuhan Maurole 14. Pengembangan Pelabuhan Atapupu 15. Pengembangan Pelabuhan Batutua 16. Pengembangan Pelabuhan Larantuka 17. Pengembangan Pelabuhan Terong 18. Pengembangan Pelabuhan Wulandoni 19. Pengembangan Pelabuhan Bari 20. Pengembangan Pelabuhan Ippi		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motamasin) 2. Pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Megapanda-Maumere) 3. Pembangunan Jalan Poros Tengah Kupang-Timor Tengah Utara (Oilmasi - Sulamo) 4. Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing (P. Sumba) 5. Pembangunan Jalan Perbatasan NTT - Timor Leste (Motomasin - Laktutus – Fatubesi – Dafala – Wedomu)		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
6. Pembangunan Jalan Perbatasan Poros Utara NTT - Timor (Faenake – Inbate – Inbate; Saenam – Nunpo; Saenam – Oenaek – Noelelo) 7. Pembangunan Jalan Batutua - Baa - Pantebaru - Eakun 8. Pembangunan Jalan Seba - Mesara 9. Pembangunan Jalan Terang - Bari - Kedindi 10. Pembangunan Jalan Lakafehan - Keliting - Wini – Sakato 11. Pembangunan Jalan Sp. Amol – Manamas 12. Pembangunan Jalan Manamas – Wini 13. Pembangunan Jalan Sp. Nurobo - Sp. Umasuker (Betun)		

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
14. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Soe – Kapan 15. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Kapan - Nenas - Sutual 16. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Sp. Tablolong - Oelalus – Oepaha 17. Pembangunan Jalan strategis dan akses Perbatasan Ruas Oepaha - Buraen - Teres – Rium 18. Pembangunan Jalan Waiwadan-Lite- Waewerang 19. Pembangunan Jalan Lato-Kawaliwu-Waiwio 20. Pembangunan Jalan Lewoleba-Loang		

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Hansisi 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bakalang 3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kajadoi 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wairiang (P. Lembata) 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante		

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maritaing*		
7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Waikelo*		
8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pamana*		
9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kawapante*		

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none">1. PLTMG Kupang Peaker 40 MW2. PLTMG Maumere Peaker 40 MW3. PLTG/MG Mobile PP NTT (Kupang) 30 MW4. PLTU Timor 1 2x25 MW5. PLTP Mataloko (FTP 2) 20 MW6. PLTMG Waingapu 10 MW7. PLTMG Alor 10 MW8. Pengembangan PLT Energi Arus Laut (Pilot Project)9. Pengembangan EBT Sumba Iconic Island10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS 2. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur 3. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Mbaing Kab. Sumba Timur 4. Pembangunan Waduk Raknamo Kab. Kupang 5. Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kab. Nagekeo		

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan untuk mencapai target pemerataan dan jangkauan pendidikan sebaiknya mempertimbangkan persoalan karakter wilayah, potensi wilayah, dan keunggulan lokal., Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah Pengembangan sekolah terpadu untuk mengakomodir keterjangkauan sekolah, Keterpaduan/sinergi pembangunan antar sektor terutama pada daerah yang terisolir2. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk SATAP SMP-SMA, termasuk perpustakaan dan laboratorium3. Meningkatkan jaminan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat		

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sosialisasi dan advokasi KB berbasis desa2. Penyediaan tenaga PLKB bagi daerah dengan TFR yang tinggi3. Pembangunan KB harus dilakukan secara terpadu lintassektor4. Peningkatan alokasi untuk program KB5. Peningkatan alokasi dana untuk mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif dengan basis Posyandu6. Peningkatan pelayanan 1000 hari pertama kehidupan balita dan anak, terutama pada wilayah rawan gizi.		

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
7. Peningkatan pelayanan kesehatan gugus pulau terutama pulau-pulau berpenghuni terisolir 8. Peningkatan eliminasi Malaria di wilayah endemis 9. Pengembangan sistem rujukan regional 10. Peningkatan rasio tenaga kesehatan, terutama untuk daerah yang jarang penduduknya 11. Peningkatan layanan kualitas kesehatan melalui sistem Sister Hospital 12. Peningkatan dukungan pengembangan Fakultas Kedokteran UNDANA 13. Dukungan pembangunan Rumah Sakit regional di Kupang, Waingapu, dan Maumere/Ende		

PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD Prov NTT	RPJMD Kab Sikka
1. Bantuan stimulan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah swadaya layak huni		

Terima Kasih

